

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D.S. (2018). Penerapan penganggaran berbasis kinerja. *Jurnal Wawasan dan Penelitian Akuntansi*, 6 (1), 36-44.
- Allo, C. G., & Asrudi, A. (2023). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. *Musamus Journal of Business & Management*, 5(2), 69-82.
- Anggerwati, A. I., Jusnia, J., & Lukman, S. D. S. (2024). Penyusunan anggaran dan pendekatan berbasis kinerja. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 3198-3206.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Saat, Ed.; 3rd ed.). Erlangga.
- Fauziah, D. (2014). *Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Kecamatan Medan Barat Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gumilang, N. A. (2025, March 15). *Pengertian penelitian kualitatif: Tujuan, karakteristik, dan tahapannya*. Gramedia Literasi.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hesrini, E. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik. *E-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA*, E-ISSN, 2442-4315.
- Inspektorat Kabupaten Jember. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jember Tahun 2022*.
- Karunia, A. H. P., & Sapari, S. (2018). ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(11).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Anggaran Berbasis Kinerja*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.

Mulyadi. (2016). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Kabupaten Jember. (2016). *Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)*.

Pollitt, C. (2007). *The New Public Management: An Overview of Its Current Status*.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*.

Puprananda, M. (2015). *Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pertanian Kota Madiun* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Rampen, A., Senduk, V., & Bacilius, A. (2021). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon: Studi Kasus Di Bapelitbangda Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 199-206.

- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Ritonga, J., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintahan Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 153-166.
- Simanjuntak, M. G. (2024). *Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan capaian sasaran strategis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 15, 1–332.
- Supardi. (2023). *Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah*. *Jurnal Manajemen Publik*, 11(2), 120–134.
- Supriyono. (2018). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Times Indonesia. (2024, Januari 18). *Bupati Jember Soroti Kinerja OPD yang Belum Capai Target Pendapatan Daerah*.